



## EKSISTENSI MUHAMMADIYAH DI ERA DISRUPSI DIGITAL: INTEGRASI IDEOLOGI, TRANSFORMASI SOSIAL-BUDAYA, DAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN

Muh. Zakki Amrulloh<sup>1)</sup>, Jefri Mardiansyah A<sup>2)</sup>, Ishomuddi<sup>3)</sup>, Budi Sunariyanto<sup>4)</sup>  
Universitas Muhammadiyah Malang<sup>1)2)</sup>, STIT Muhammadiyah Bojonegoro<sup>3)</sup>, STIT  
Muhammadiyah Tempurejo Ngawi<sup>4)</sup>.

[Zacky.arah@gmail.com](mailto:Zacky.arah@gmail.com)<sup>1)</sup>, [jefrimardiansyah95@gmail.com](mailto:jefrimardiansyah95@gmail.com)<sup>2)</sup>, [mmishom@gmail.com](mailto:mmishom@gmail.com)<sup>3)</sup>,  
[abu.azzam525@gmail.com](mailto:abu.azzam525@gmail.com)<sup>4)</sup>.

### ABSTRACT

*Muhammadiyah faces the challenges of digital disruption, radicalism, and generational shifts. This article analyzes the existence of Muhammadiyah through the integration of ideological belief, socio-cultural transformation, and leadership management systems. The method employed is a qualitative descriptive-analytical literature study, drawing on sources from journals, books, official documents, and digital platforms. Data analysis adapts the model of Miles, Huberman, and Saldaña. The main findings indicate that Muhammadiyah's resilience is rooted in three dimensions: (1) theological belief that integrates faith, *tajdīd*, rationality, moderation, and social justice; (2) cultural transformation through the negotiation of purification with local wisdom, character education, the theology of *Al-Ma'un*, ecology, and ethical technology; and (3) collegial leadership management based on deliberation, cadre formation, autonomy, and professionalism. The contribution of this article lies in demonstrating that Muhammadiyah's existence does not rely solely on its charitable enterprises, but also on an adaptive system of values and organization. In conclusion, Muhammadiyah remains existent by connecting these three dimensions; however, digital challenges and generational change require continuous strategic renewal. Future research should examine the empirical implementation of digitalization within Muhammadiyah's charitable enterprises.*

**Keywords:** *Muhammadiyah, tajdīd, cultural transformation, collegial leadership, contemporary challenges*

### ABSTRAK

Muhammadiyah menghadapi tantangan disrupsi digital, radikalisme, dan pergeseran generasi. Artikel ini menganalisis eksistensi Muhammadiyah melalui integrasi keyakinan ideologis, transformasi budaya-sosial, dan sistem manajemen kepemimpinan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif deskriptif-analitis dengan sumber dari jurnal, buku, dokumen resmi, dan platform digital. Analisis data mengadaptasi model Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan utama menunjukkan bahwa daya tahan Muhammadiyah bersumber

dari tiga dimensi: (1) keyakinan teologis yang memadukan akidah, tajdīd, rasionalitas, moderasi, dan keadilan sosial; (2) transformasi budaya melalui negosiasi purifikasi dengan kearifan lokal, pendidikan karakter, teologi Al-Ma'un, ekologi, dan teknologi etis; (3) manajemen kepemimpinan kolejal berbasis musyawarah, kaderisasi, otonomi, dan profesionalisme. Kontribusi artikel ini adalah menunjukkan bahwa eksistensi Muhammadiyah tidak hanya bertumpu pada amal usaha, tetapi pada sistem nilai dan organisasi yang adaptif. Kesimpulannya, Muhammadiyah tetap eksis dengan menghubungkan ketiga dimensi tersebut, namun tantangan digital dan perubahan generasi menuntut pembaruan strategi berkelanjutan. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasi digitalisasi amal usaha secara empiris.

**Kata Kunci:** *Muhammadiyah, tajdīd, transformasi budaya, kepemimpinan kolejal, tantangan zaman*

## PENDAHULUAN

Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, merupakan salah satu organisasi Islam modernis terbesar yang telah melampaui satu abad perjalanan sejarah. Sejak awal, gerakan ini hadir sebagai respons terhadap kebakuan pemikiran umat Islam di Indonesia melalui semangat tajdīd, yakni pembaruan yang memadukan ajaran Islam autentik dan kemajuan ilmu pengetahuan modern (Arifianto, 2024). Dalam perkembangannya, Muhammadiyah tumbuh sebagai entitas sosial-keagamaan yang mengelola lembaga pendidikan, kesehatan, panti asuhan, serta amal usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Kebesaran kelembagaan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru. Muhammadiyah tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan klasik seperti keterbelakangan pendidikan atau kemiskinan, tetapi juga dengan disrupsi digital, pergeseran demografi umat, perubahan pola belajar keagamaan, dan fragmentasi otoritas keislaman. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2025 menunjukkan bahwa 89 persen diskusi keislaman progresif berlangsung di ruang digital, sementara generasi muda Muhammadiyah menjadi salah satu aktor aktif di dalamnya (Nashrul, 2025). Fenomena ini menuntut strategi dakwah dan pendidikan yang lebih adaptif.

Perubahan lanskap digital semakin kompleks karena kecerdasan buatan mulai memengaruhi cara umat mengakses pengetahuan agama. Algoritma media sosial dan chatbot

dapat mengambil sebagian fungsi rujukan keagamaan yang sebelumnya dijalankan oleh guru, ulama, organisasi, atau lembaga pendidikan (Nasrul, 2025). Penelitian Adhantoro et al. (2025) mengenai aplikasi ChatMu menunjukkan bahwa inovasi digital internal Muhammadiyah mampu meningkatkan akses informasi, tetapi masih menghadapi kendala navigasi dan inkonsistensi konten. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara potensi teknologi dan kesiapan budaya organisasi.

Pada saat yang sama, Muhammadiyah menghadapi tantangan ideologis berupa radikalisme digital yang menasar generasi muda, termasuk peserta didik di lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah memiliki tradisi wasathiyah, Muthohirin dan Suherman (2024) menekankan perlunya kontekstualisasi ulang filosofi pendidikan Muhammadiyah agar lebih efektif membentengi generasi muda dari ekstremisme berbasis kekerasan. Strategi dakwah moderat melalui portal digital seperti PWMU.co, Klikmu.co, dan Majelistabligh.id telah dikembangkan, tetapi jangkauannya masih memerlukan penguatan (Anto et al., 2025).

Dari sisi kelembagaan, Muhammadiyah menghadapi paradoks skalabilitas. Semakin besar jaringan organisasi dan amal usahanya, semakin kompleks pula tuntutan tata kelola yang harus dipenuhi. Hingga tahun 2025, Muhammadiyah diperkirakan memiliki lebih dari 60 juta anggota dan aset yang sangat besar (Setiawan, 2025). Jaringan pendidikannya meliputi ribuan sekolah, pesantren, perguruan tinggi, taman kanak-kanak, dan pendidikan anak usia dini, sedangkan sektor kesehatannya mencakup rumah sakit dan klinik di berbagai daerah (Malik, 2025). Namun, digitalisasi amal usaha masih menghadapi kendala infrastruktur, budaya organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia (Siskawandari & Risna, 2025).

Permasalahan utama artikel ini terletak pada ketegangan antara warisan historis Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam dan tuntutan transformasi kontemporer. Daya tahan historis Muhammadiyah telah terbukti, tetapi respons adaptifnya tetap memerlukan penguatan struktural dan kultural (Suradji et al., 2023). Kekhawatiran tersebut sejalan dengan peringatan tokoh Muhammadiyah bahwa tanpa transformasi yang sesuai dengan zaman, organisasi ini berisiko ditinggalkan generasi Z dan Alpha (Malik, 2025). Abdul Mu'ti juga mengingatkan bahaya degradasi, delusi, dan disrupsi apabila pola pikir dakwah tidak diperbarui (Nashrul, 2025).

Penelitian terdahulu membahas eksistensi Muhammadiyah melalui tema yang masih terpisah, seperti pola dakwah dan penguatan amal usaha (Ningsih et al., 2022), dinamika pendidikan dan pengkaderan (Sari & Asri, 2023), perkembangan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial (Hilal et al., 2024), serta pengaruh sejarah, ideologi, ekonomi, dan aktor lokal terhadap perkembangan organisasi (Ruslana et al., 2021). Kebaruan artikel ini terletak pada analisis integratif mengenai kemampuan Muhammadiyah mempertahankan eksistensinya di era disrupsi digital melalui keterhubungan ideologi, transformasi sosial-budaya, dan manajemen kepemimpinan sebagai satu kerangka adaptasi organisasi.

Fenomena “Log-in Muhammadiyah” menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya menjadi arena komunikasi, tetapi juga pintu baru bagi generasi muda untuk mengenal, menilai, dan mendekat pada nilai-nilai Muhammadiyah. Dalam konteks bonus demografi 2030–2040, gejala ini berkaitan langsung dengan posisi generasi muda Muslim sebagai *digital natives* yang mencari rujukan keagamaan melalui YouTube, Instagram, TikTok, dan platform sejenis. Istilah “login Muhammadiyah” dipahami sebagai ekspresi ketertarikan generasi muda terhadap nilai Muhammadiyah yang rasional, adaptif, dan relevan dengan kehidupan modern (UMY, 2026). Namun, fenomena ini tidak cukup dibaca sebagai tren popularitas semata. Ia menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Muhammadiyah untuk menerjemahkan keyakinan ideologis, transformasi budaya-sosial, serta sistem manajemen organisasi ke dalam strategi pelibatan generasi muda yang lebih terarah.

Secara teoretis, artikel ini bertujuan memperkaya pengembangan konsep Islam Berkemajuan sebagai paradigma Muhammadiyah dalam menghadapi era disrupsi. Secara praktis, artikel ini diharapkan memberi masukan bagi pimpinan, amal usaha, dan organisasi otonom Muhammadiyah dalam merumuskan kebijakan transformasi yang tetap menjaga identitas ideologis. Analisis ini juga dapat menjadi rujukan bagi organisasi keagamaan lain yang menghadapi persoalan serupa, terutama dalam menjaga keseimbangan antara prinsip dasar keagamaan dan tuntutan perubahan sosial-teknologis

## **METODE**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan corak deskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu keyakinan Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman, transformasi nilai-nilai budaya dan sosial, serta sistem manajemen dan kepemimpinan organisasi (Creswell & Poth, 2017). Sumber data sekunder mencakup jurnal akademik, buku, dokumen resmi Muhammadiyah,

dan platform digital resmi yang relevan dengan tema kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis dengan mempertimbangkan relevansi topik, kebaruan sumber, dan kredibilitas rujukan (Bowen, 2009). Analisis data mengadaptasi model Miles, Huberman, dan Saldaña (2013) melalui kondensasi data, penyajian narasi tematik, dan verifikasi. Agar alur kajian lebih dapat ditelusuri, sumber-sumber yang dikaji dikelompokkan ke dalam tema teologi dan ideologi, pendidikan dan budaya sosial, serta manajemen organisasi. Validasi dilakukan melalui perbandingan lintas sumber dan pembacaan kritis terhadap konsistensi argumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keyakinan Muhammadiyah dalam Menghadapi Tantangan Zaman**

Keyakinan Muhammadiyah dapat dipahami sebagai konstruksi teologis yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus menghubungkan kemurnian akidah, rasionalitas, dan tanggung jawab sosial. Bakry et al. (2021) menegaskan bahwa fondasi doktrinal tersebut membentuk sistem keyakinan yang terlembaga dalam organisasi. Orientasi tajdīd kemudian menjadi dasar pembaruan keagamaan yang tidak menutup diri terhadap perubahan. Melalui pembacaan rasional dan kontekstual, ajaran Islam diolah menjadi pedoman etis bagi masyarakat berkemajuan (Fanani et al., 2021).

Muhammadiyah lahir sebagai gerakan modernis yang merespons keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, krisis moral, dan tantangan dakwah. Takdir & Munir (2025) menjelaskan bahwa pembaruan Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari orientasi sosialnya. Karena itu, iman tidak berhenti pada membenaran doktrinal, tetapi diterjemahkan menjadi amal sosial melalui lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, dan amal usaha. Pada titik ini, keyakinan Muhammadiyah bekerja sebagai energi peradaban yang menghubungkan tauhid dengan transformasi sosial.

Konsep tajdīd menempati posisi sentral karena mengandung dua dimensi: pemurnian dan pembaruan. Fanani et al. (2021) menunjukkan bahwa manhaj tarjih Muhammadiyah tidak terikat secara mutlak pada mazhab klasik, tetapi menggabungkan tekstualitas, rasionalitas, dan spiritualitas. Pola tersebut memungkinkan Muhammadiyah mempertahankan prinsip tauhid sambil mengembangkan ijtihad terhadap persoalan baru. Tajdīd dengan demikian bukan sekadar slogan pembaruan, melainkan cara berpikir keagamaan yang menjaga kesinambungan antara nash, akal, konteks, dan kemaslahatan.

Rasionalitas dalam Muhammadiyah dapat dipahami sebagai dasar epistemologis untuk membaca teks keagamaan dan realitas sosial secara proporsional. Nalar Muhammadiyah sebagai perpaduan antara skripturalisme, rasionalisme, dan pertimbangan substantif-pragmatis (Al-Hamdi, 2023). Dengan kerangka ini, pengetahuan keagamaan tidak dibangun secara kaku, tetapi melalui dialog antara dalil, akal, konteks, dan kemaslahatan. Epistemologi rasional tersebut memungkinkan Muhammadiyah merumuskan sikap keagamaan yang terbuka terhadap ilmu, relevan dengan perubahan, dan bertanggung jawab secara teologis.

Moderasi atau wasathiyah menjadi konsekuensi dari epistemologi tersebut. Muhammadiyah tidak memaknai kemurnian akidah sebagai alasan untuk menolak pluralitas, sebab Qodir et al. (2021) menunjukkan adanya praktik sosial yang toleran dan berorientasi pada kebaikan publik. Dalam konteks kebangsaan, Bachtiar (2022) menafsirkan penerimaan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai *Dār al-‘Ahd wa al-Shahādah* sebagai bentuk ijtihad teologis. Negara dipahami sebagai ruang konsensus dan kesaksian moral, bukan sekadar arena kompetisi kekuasaan.

Sikap politik Muhammadiyah memperlihatkan keseimbangan antara keterlibatan publik dan jarak kritis terhadap kekuasaan. Al-Hamdi (2023) menilai bahwa Muhammadiyah lebih memilih dakwah kultural, penguatan masyarakat sipil, dan pembentukan pusat-pusat keunggulan daripada keterikatan langsung pada partai politik. Sikap ini menjaga independensi moral organisasi, sekaligus membuka ruang pengaruh melalui gagasan, kader, dan amal usaha strategis. Dengan demikian, kontribusi politik Muhammadiyah lebih bersifat substantif daripada elektoral.

Dalam ranah pendidikan, Muhammadiyah berkontribusi melalui gagasan pendidikan Islam progresif yang menjembatani Islam, keIndonesiaan, dan modernitas. Suyatno et al. (2022) menjelaskan bahwa pendidikan Muhammadiyah mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Integrasi tersebut menunjukkan orientasi pendidikan yang tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan kepribadian yang utuh. Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk melampaui hafalan doktrin menuju kesadaran kritis, kedalaman spiritual, tanggung jawab sosial, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman.

Respons Muhammadiyah terhadap sains dan teknologi juga bertumpu pada nilai profetik. Qorib dan Afandi (2024) menegaskan bahwa toleransi, persaudaraan, dan

kepedulian sosial perlu menjadi dasar transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka ini, teknologi tidak dipandang netral sepenuhnya, tetapi harus diarahkan oleh etika kemanusiaan. Muhammadiyah menawarkan dasar religius agar modernisasi tidak melahirkan dehumanisasi, ketimpangan, atau kerusakan ekologis, melainkan menjadi sarana memperluas kemaslahatan.

Keyakinan Muhammadiyah juga tampak dalam keberpihakan terhadap keadilan sosial. Al-Ansi et al. (2023) menggambarkan organisasi Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, sebagai aktor sosial yang berperan dalam kesejahteraan publik. Arah ini selaras dengan tradisi amal usaha yang menjadikan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial sebagai dakwah nyata. Fikih Difabel bahkan memperluas makna keadilan dengan menggeser pendekatan dari belas kasihan menuju hak, martabat, dan inklusi (Maftuhin & Muflihati, 2022).

Dalam isu lingkungan, keyakinan Muhammadiyah bergerak dari fikih menuju advokasi ekologis. Efendi (2021) menunjukkan bahwa kepedulian terhadap air, bencana, dan agraria menjadi bagian dari perjuangan keadilan ekologis. Dimensi spiritualitasnya juga tidak sederhana. Muhammadiyah dikenal kritis terhadap praktik tasawuf tertentu, tetapi tetap menerima spiritualitas berbasis tauhid, akhlak, dan ihsan (Muttaqin et al., 2023). Penerimaan terhadap neo-sufisme yang sejalan dengan purifikasi dan reformasi memperlihatkan bahwa rasionalitas tidak meniadakan kedalaman batin (Bachtiar et al., 2025).

Sintesis bagian ini menunjukkan bahwa daya tahan Muhammadiyah bersumber dari keseimbangan akidah, akal, dan amal. Keberlanjutan tersebut diperkuat oleh struktur kepemimpinan kolejial yang menyebarkan otoritas keagamaan dan mencegah ketergantungan pada figur tunggal (Kim, 2023). Namun, dinamika internal seperti evolusi manhaj tarjih, ambiguitas praktik keagamaan tertentu, dan relasi dengan kecenderungan Salafi tetap perlu dikelola melalui pendidikan ideologi yang matang (Nasir, 2023).

### **Transformasi Nilai-Nilai Budaya dan Sosial Muhammadiyah**

Keyakinan teologis Muhammadiyah tidak berhenti pada tataran doktrin, tetapi bergerak menjadi nilai budaya dan sosial yang hidup dalam praksis organisasi. Transformasi tersebut dapat dibaca sebagai pergeseran dari puritanisme modernis menuju Islam yang lebih kontekstual, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Takdir dan Munir (2025) menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang lahir dari krisis sosial,

moral, pendidikan, dan keagamaan. Karena itu, pembaruan nilai berlangsung melalui dakwah, pendidikan, pelayanan, dan kebudayaan.

Sebagai organisasi Islam modernis, Muhammadiyah tetap menjaga ortodoksi Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak selalu memaknai pembaruan sebagai penolakan terhadap budaya lokal. Qodir et al. (2021) menunjukkan corak keberagaman yang secara lahir tegas dalam purifikasi, tetapi secara sosial lentur, toleran, dan akomodatif. Dalam perkembangan mutakhir, budaya lokal tidak diperlakukan sebagai ancaman, melainkan diseleksi melalui prinsip tauhid, kemaslahatan, dan etika sosial. Inilah ruang negosiasi antara purifikasi dan kebudayaan.

Transformasi budaya tersebut tampak pada pergeseran dari citra anti-tradisi menuju akomodasi selektif terhadap kearifan lokal. Burga & Damopolii (2022) menegaskan bahwa budaya lokal dapat menjadi basis penguatan moderasi beragama dalam lembaga pendidikan Islam. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah dapat menempatkan budaya sebagai medium dakwah tanpa kehilangan identitas purifikatif. Akomodasi selektif menjadi penting karena masyarakat Indonesia hidup dalam keragaman etnis, bahasa, simbol, dan praktik sosial yang memerlukan pendekatan berbeda.

Pendidikan menjadi arena utama transformasi nilai budaya dan sosial Muhammadiyah. Hamami dan Nuryana (2022) menekankan pendekatan holistik-integratif dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan tidak diarahkan semata pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan manusia beriman, rasional, nasionalis, dan peduli sosial. Nilai budaya dan sosial ditanamkan melalui kurikulum, budaya sekolah, organisasi peserta didik, serta pembiasaan amal.

Pendidikan karakter moderat memperjelas fungsi sosial pendidikan Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Islam dapat membentuk karakter tawasuth, tawazun, dan ta'adul sebagai dasar keberagaman seimbang (Umar et al., 2024). Pendidikan damai berbasis Islam memuat nilai antikekerasan dan prinsip Qur'ani tentang harmoni sosial (Santoso & Khisbiyah, 2021). Dalam konteks Muhammadiyah, pendidikan menjadi ruang pembentukan kepribadian yang menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan memperkuat budaya demokratis.

Nilai Al-Ma'un merupakan fondasi sosial yang mengubah ibadah menjadi pembelaan terhadap masyarakat rentan. Shodikin et al. (2025) menunjukkan bahwa teologi Al-Ma'un dapat diaktualisasikan dalam tata kelola akuntabel, partisipatif, dan berorientasi

pada kesejahteraan. Al-Ansi et al. (2023) juga menempatkan organisasi Islam Indonesia sebagai aktor sosial yang menjawab kebutuhan publik. Melalui amal usaha, Muhammadiyah mengubah nilai keagamaan menjadi institusi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan filantropi yang berkelanjutan.

Dimensi kebudayaan Muhammadiyah semakin terlihat ketika seni dan tradisi lokal dijadikan media dakwah. Inovasi dakwah Islam melalui tari Bedhayan Gagrag Sumirat Puspito, yang menunjukkan bahwa seni dapat menjadi sarana penyampaian nilai keagamaan (Restian et al., 2024). Pendekatan ini penting karena dakwah tidak selalu efektif jika hanya mengandalkan ceramah formal. Dalam kerangka yang sama, pencarian spiritualitas autentik melalui akhlak, ihsan, dan kedalaman batin memperkaya budaya organisasi (Muttaqin et al., 2023).

Transformasi nilai sosial juga meluas pada isu ekologi dan teknologi. Efendi (2021) menjelaskan pergeseran gerakan ekologis Muhammadiyah dari fikih menuju advokasi politik, terutama dalam isu air, bencana, dan agraria. Qorib dan Afandi (2024) menegaskan bahwa nilai profetik seperti toleransi, kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian sosial perlu membimbing perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kesalehan sosial tidak hanya menyangkut hubungan antarmanusia, tetapi juga tanggung jawab terhadap alam dan kemajuan teknologi yang manusiawi.

Faktor pendukung transformasi budaya Muhammadiyah tampak pada kemampuannya beradaptasi dengan keragaman lokal tanpa kehilangan arah ideologis. Nilai Bugis-Makassar, seperti siri' dan paccé, turut membentuk kepemimpinan independen serta memperkuat penyebaran organisasi melalui jaringan aktivis Muhammadiyah (Halim & Nubowo, 2025). Sejalan dengan itu, dinamika gerakan Islam progresif di Sulawesi Selatan sebagai bukti bahwa budaya lokal, struktur sosial, kepemimpinan daerah, dan jejaring antarwilayah menjadi modal penting bagi keberlanjutan transformasi Muhammadiyah (Hadisaputra et al., 2024).

Walaupun demikian, transformasi budaya tidak bebas dari ketegangan. Promosi moderasi Islam di Indonesia berlangsung dalam medan kontestasi antara kecenderungan konservatif dan moderat (Jubba et al., 2022). Pada Muhammadiyah, ketegangan juga dapat muncul ketika purifikasi dipahami secara kaku sehingga membatasi apresiasi terhadap budaya lokal. Paradoks juga terjadi antara ketegangan luar dan kelenturan internal dalam

praktik Muhammadiyah di Jawa (Qodir et al., 2021). Karena itu, literasi ideologi diperlukan agar seleksi budaya tidak berubah menjadi penolakan total.

Kontribusi bagian ini bagi Pendidikan Agama Islam terletak pada penegasan bahwa nilai budaya dan sosial dapat ditransformasikan tanpa kehilangan dasar teologis. Pendidikan holistik-integratif, pendidikan damai, moderasi, dakwah kultural, ekologi, dan teknologi etis menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus berakar sekaligus terbuka terhadap perubahan (Hamami & Nuryana, 2022). Dalam konteks ini, Muhammadiyah menawarkan model pendidikan dan kebudayaan yang menjaga kemurnian tauhid sambil bernegosiasi dengan realitas sosial Indonesia.

### **Sistem Manajemen dan Kepemimpinan Muhammadiyah**

Nilai sosial Muhammadiyah hanya dapat berkelanjutan apabila ditopang oleh sistem kepemimpinan dan tata kelola yang kuat. Sistem manajemen Muhammadiyah memperlihatkan konstruksi organisasi Islam modern yang menekankan rasionalitas, kolegialitas, dan tanggung jawab moral. Kepemimpinan tidak diletakkan pada figur karismatik tunggal, melainkan pada mekanisme kelembagaan yang membagi otoritas secara seimbang. Kim (2023) menjelaskan bahwa model kepemimpinan kolegial Muhammadiyah berfungsi mereduksi dominasi personal dalam otoritas keagamaan.

Ciri utama kepemimpinan Muhammadiyah adalah kolektif-kolegial. Kepemimpinan dijalankan oleh badan bersama dengan hak yang relatif setara antarpemimpin, berbeda dari pola hierarkis yang menempatkan satu tokoh sebagai pusat keputusan. Menurut Kim (2023), sistem ini mencegah lahirnya pemimpin absolut atau figur yang tidak dapat dikritik. Implikasinya, keputusan organisasi lebih terbuka terhadap musyawarah, koreksi, dan pertimbangan rasional, sehingga keberlanjutan organisasi tidak bergantung pada satu pribadi tertentu.

Prinsip egalitarianisme memperlihatkan bahwa pemimpin Muhammadiyah dipandang sebagai anggota yang diberi amanah, bukan pemilik otoritas sakral. Halim dan Nubowo (2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan Muhammadiyah didasarkan pada integritas moral, pengetahuan Islam, dan keterbukaan sistem, bukan loyalitas personal. Pada level pemilihan, anggota memilih sejumlah kandidat, sehingga dominasi individu dan personal branding dapat ditekan (Kim, 2023). Desain ini memperkuat distribusi kewenangan serta menjaga stabilitas organisasi lintas generasi.

Nilai syura atau musyawarah menjadi dasar normatif dalam pengambilan keputusan. Bakry et al. (2021) mengaitkan konsep kepemimpinan dan kenegaraan Muhammadiyah dengan prinsip konsultasi, keadilan, kesetaraan, dan pluralitas. Prinsip ini menunjukkan bahwa manajemen Muhammadiyah tidak hanya menggunakan teori organisasi modern, tetapi juga berakar pada etika Islam. Dalam konteks organisasi besar, musyawarah menjaga legitimasi keputusan, meskipun prosesnya menuntut koordinasi dan kedewasaan kelembagaan.

Dalam bidang politik organisasi, Muhammadiyah menempatkan diri sebagai kekuatan moral, bukan partai politik. Al-Hamdi (2023) menjelaskan bahwa kesadaran politik Muhammadiyah bergerak melalui dakwah, advokasi, dan pengaruh sipil, sedangkan Bakry et al. (2021) menegaskan relevansinya dengan prinsip negara yang adil dan konsultatif. Posisi ini memperlihatkan kematangan manajemen gerakan karena organisasi dapat terlibat dalam kehidupan publik tanpa sepenuhnya terserap dalam kompetisi elektoral.

Tata kelola pada tingkat lokal memperlihatkan keterkaitan antara manajemen modern dan teologi sosial. Shodikin et al. (2025) menunjukkan bahwa aktualisasi teologi Al-Ma'un dalam tata kelola Muhammadiyah di Lamongan diwujudkan melalui akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Nilai tersebut menegaskan bahwa manajemen bukan sekadar teknik administratif, melainkan instrumen keberpihakan. Dengan kerangka ini, tata kelola Muhammadiyah menghubungkan efisiensi organisasi dengan orientasi kemanusiaan.

Dalam pendidikan, Muhammadiyah menerapkan fungsi manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Setiawan (2025) menjelaskan bahwa modernisasi pendidikan Islam Muhammadiyah berkaitan dengan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Pola ini memperlihatkan bahwa manajemen pendidikan tidak bergerak secara spontan, tetapi melalui proses sistematis. Kontribusinya bagi Pendidikan Agama Islam ialah menunjukkan bahwa lembaga keagamaan perlu dikelola secara profesional agar nilai spiritual dapat diterjemahkan menjadi layanan yang bermutu.

Otonomi cabang dan amal usaha menjadi kekuatan sekaligus tantangan manajerial. Kim (2023) menyatakan bahwa pengambilan keputusan berbasis konsensus didukung oleh ruang otonomi bagi cabang dan institusi afiliasi. Struktur ini memungkinkan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial beradaptasi dengan kebutuhan lokal tanpa melepaskan diri dari

prinsip organisasi. Namun, otonomi juga menuntut pengawasan kuat agar mutu layanan, akuntabilitas, dan konsistensi ideologi tetap terjaga di berbagai daerah.

Regenerasi kepemimpinan Muhammadiyah berlangsung melalui kaderisasi formal, informal, dan berkelanjutan. Hadisaputra et al. (2024) dan Halim dan Nubowo (2025) menunjukkan adanya program seperti IPM, IMM, Baitul Arqam, serta pembinaan kader di sekolah, universitas, rumah sakit, dan layanan sosial. Kaderisasi juga berlangsung dalam keluarga dan program penyegaran pimpinan. Pola ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Muhammadiyah tidak diserahkan pada proses alamiah, tetapi dibangun melalui pendidikan ideologi dan peningkatan kapasitas kepemimpinan.

Dimensi gender dalam kepemimpinan memperlihatkan adaptasi organisasi terhadap perubahan zaman. Kahardani et al. (2025) menunjukkan bahwa kepala sekolah perempuan milenial di sekolah dasar Muhammadiyah Yogyakarta menampilkan kepemimpinan efektif melalui orientasi tugas, perubahan, relasi, dan hubungan eksternal. Pelatihan organisasi dan beasiswa ikut mendukung efektivitas tersebut. Fakta ini memperluas pemahaman bahwa kepemimpinan Islam dapat bertumpu pada kompetensi, integritas, dan kapasitas manajerial, bukan semata kategori gender.

Sistem manajemen Muhammadiyah juga mendukung inovasi digital dan pengembangan sistem keuangan modern. Kahardani et al. (2025) juga mengaitkan inovasi tersebut dengan budaya kolektif-kolegial serta integrasi nilai Islam dan manajemen modern. Dalam konteks disrupsi digital, tata kelola teknologi perlu diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Digitalisasi tidak boleh hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi harus menjadi sarana memperluas akses, meningkatkan mutu layanan, dan menjaga integritas organisasi.

Faktor pendukung keberhasilan manajemen Muhammadiyah terletak pada kombinasi nilai agama, struktur organisasi, profesionalisme, kaderisasi, dan jaringan amal usaha. Kim (2023) menekankan difusi otoritas melalui kepemimpinan kolegial, sedangkan Shodikin et al. (2025) menegaskan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi dalam tata kelola lokal. Namun, kepemimpinan kolegial juga dapat memperlambat keputusan dalam situasi mendesak. Selain itu, perbedaan kapasitas cabang dapat memengaruhi mutu pendidikan, pelayanan sosial, dan konsistensi kebijakan.

## PENUTUP

Muhammadiyah tetap eksis menghadapi tantangan zaman karena mampu menghubungkan keyakinan teologis, transformasi sosial-budaya, dan sistem manajemen kolektif-kolegial. Pada dimensi keyakinan, Muhammadiyah memadukan kemurnian akidah, tajdīd, rasionalitas, moderasi, dan keadilan sosial. Pada dimensi budaya dan sosial, organisasi ini menegosiasikan purifikasi dengan kearifan lokal, pendidikan karakter, dakwah kultural, Al-Ma'un, ekologi, dan teknologi etis. Pada dimensi manajemen, Muhammadiyah mengembangkan kepemimpinan kolegial, musyawarah, kaderisasi, otonomi, dan profesionalisme kelembagaan.

Kontribusi utama artikel ini adalah memperlihatkan bahwa daya tahan Muhammadiyah tidak hanya bersumber dari besarnya amal usaha, tetapi dari kemampuannya membangun sistem nilai dan sistem organisasi yang saling menguatkan. Tantangan digital, radikalisme, perubahan generasi, dan kompleksitas kelembagaan menuntut Muhammadiyah terus memperbarui strategi tanpa kehilangan dasar ideologis. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat dipahami sebagai model gerakan Islam modern yang mempertahankan ortodoksi, mengelola perubahan budaya, dan membangun tata kelola sosial-keagamaan yang adaptif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhantoro, M. S., Gunawan, D., Prayitno, H. J., Riyanti, R. F., Purnomo, E., & Jufriansah, A. (2025). Strategic technological innovation through ChatMu: Transforming information accessibility in Muhammadiyah. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8. <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1446590>
- Al-Ansi, A., Sulistyaningsih, T., Wibowo, M., & Garad, A. (2023). The Islamic organizations in Indonesia 'Muhammadiyah and NU': Social perspective explanation. *Dirasat: Human and Social Sciences*. <https://doi.org/10.35516/hum.v50i5.1124>
- Al-Hamdi, R. (2023). Political consciousness of Muhammadiyah: Historical trajectories and future. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15866>
- Anto, M. A., Huda, S., & Anam, K. (2025). Digital Da'wah Strategies for Moderate Islamic Communication: A Content Analysis of Muhammadiyah East Java's Online Platforms. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(2), 202–211. <https://doi.org/10.22373/arj.v5i2.30818>
- Arifianto, A. R. (2024). Moderate Islamic Organisations and Contestation Over Political Theology: The Responses by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Towards Islamism in Indonesia. In G. Facal, E. Lafaye de Micheaux, & A. Norén-Nilsson

- (Eds.), *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia* (pp. 337–355). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-9655-1\\_20](https://doi.org/10.1007/978-981-99-9655-1_20)
- Amrulloh, M. Z., Ishomuddin, M. Rondi, & Mardiansyah A., J. (2026). Coexistence And Integration: An Analysis Of Social Dynamics Between Muhammadiyah And Nu In Rural Areas. *SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, 14(4), 4517–4526. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6862>
- Bachtiar, H. (2022). Theologising democracy in the context of Muhammadiyah’s ijtihād. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.165-200>
- Bachtiar, H., Nurhakim, M., & Rohim, F. (2025). Purification, spiritualism, and reform: Muhammadiyah’s reception of neo-sufism. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2025.15.1.84-112>
- Bakry, K., Asse, A., Syamsuddin, D., Salenda, K., & Shaari, R. (2021). Political dynamics of Muhammadiyah and its relevance to the concept of the state in Islam. *AL-’ADALAH*. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6824>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Burga, M., & Damopolii, M. (2022). Reinforcing Religious Moderation through Local Culture-Based Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19879>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=gX1ZDwAAQBAJ>
- Efendi, D. (2021). From fiqh to political advocacy: Muhammadiyah’s ecological movement in the post New Order Indonesia. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.14444>
- Eka Febryani Siskawandari; Risna, R. D. R. B. J. Y. N. L. R. (2025). Masa Depan Manajemen Muhammadiyah: Adaptasi AIK di Era Digital. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, (Vol. 4 No. 5: Juli 2025), 8319–8326.
- Fanani, A., Hamzani, A., Khasanah, N., & Sofanudin, A. (2021). Muhammadiyah’s manhaj tarjih: An evolution of a modernist approach to Islamic jurisprudence in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6942>
- Hadisaputra, H., Bosra, M., Damayanti, E., Azis, F., & Nur, A. (2024). The dynamics of the progressive Islamic movement in South Sulawesi. *Society*. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.429>
- Halim, W., & Nubowo, A. (2025). Muhammadiyah Bugis-Makassar: Dispersal of Muslim organizations in and from South Sulawesi, Indonesia. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i2.42544>
- Hamami, T., & Nuryana, Z. (2022). A holistic–integrative approach of the Muhammadiyah education system in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4), 10. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7607>
- Hidayah, N., Faridi, F., & Hikmatulloh, H. (2025). Muhammadiyah’s Religious Ideology and the Challenges of Transnationalism in Islamic Religious Education in Indonesia. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 325–332. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1030>
- Hilal, Muhammad Zaid Ramadhan, Ahmad Dedy, Nana Mardiana, & Milana Abdillah Subarkah. (2024). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan Islami, Sosial dan

- Ekonomi (Studi Muhammadiyah Daerah Ciledug). *Masterpiece Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(2), 53–66. <https://doi.org/10.62083/h9zgw29>
- Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., H., & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116162>
- Kahardani, M., Sudibjo, N., Pramono, R., & Tan, J. (2025). Leadership of millennial women in Muhammadiyah elementary schools: A multi-specific study of elementary schools in Yogyakarta City, Indonesia. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i1.618>
- Kim, H. (2023). Collegial leadership and election in Muhammadiyah: Institutional ways to diffuse the religious authority of leaders. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i2.33741>
- Maftuhin, A., & Muflihati, A. (2022). The fikih difabel of Muhammadiyah: Context, content, and aspiration to an inclusive Islam. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>
- Malik, I. (2025). *Muhammadiyah Terus Berupaya Berikan Kontribusi Bagi Bangsa—RRI.co.id*. Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. <https://rri.co.id/madiun/olimpik/1990003/muhammadiyah-terus-berupaya-berikan-kontribusi-bagi-bangsa>
- Meyer, V. (2024). Grave matters: Ambiguity, modernism, and the quest for moderate Islam in Indonesia. *Journal of the American Academy of Religion*. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfae061>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muthohirin, N., & Suherman, S. (2024). Muhammadiyah's educational philosophy and contextualization of Islamic moderation: Challenges to religious extremism. In *Strengthening Professional and Spiritual Education through 21st Century Skill Empowerment in a Pandemic and Post-Pandemic Era*. Routledge.
- Muttaqin, A., Hamsah, U., & Abror, R. (2023). Muhammadiyah, sufism, and the quest for 'authentic' Islamic spirituality. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.199-226>
- Nashrul, M. (2025, May 31). Muhammadiyah Jawa Barat — Digital Nalar: Ketika Jari-jari Muhammadiyah Mengetik Peradaban. *Muhammadiyah Jawa Barat*. <https://muhammadiyah-jabar.id/digital-nalar-ketika-jari-jari-muhammadiyah-mengetik-peradaban/>
- Nasir, M. (2023). Weaving modernity in Salafism. *Australian Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.55831/ajis.v8i3.619>
- Nasrul, E. (2025). *Muhammadiyah di Era Kecerdasan Artifisial | Republika Online*. Republika. <https://analisis.republika.co.id/berita/sxkgdk451/muhammadiyah-di-era-kecerdasan-artifisial>
- Ningsih, Basri Basri, & Abdul Rahim. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Amal Usaha Muhammadiyah Desa Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Wawasan Sarjana*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.35326/juwara.v1i2.3186>
- Qodir, Z., Jubba, H., Mutiarin, D., & Hidayati, M. (2021). Muhammadiyah identity and Muslim public good: Muslim practices in Java. *International Journal of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.24035/ijit.19.2021.203>

- Qorib, M., & Afandi, A. (2024). Implementing prophetic values in the Islamic life guidelines for Muhammadiyah citizens: A qualitative analysis for transforming science and technology. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i1.1129>
- Restian, A., Jazuli, M., Cahyono, A., & Yanuartuti, S. (2024). Bedhayan Gagrag Sumirat Puspito dance: The innovation in conveying Islamic da'wah through arts. *Research Journal in Advanced Humanities*. <https://doi.org/10.58256/6v2xx519>
- Rusliana, Sopaat Rahmat Selamat, & Yudi Daryadi. (2021). Para Saudagar Batik dan Pengembangan Muhammadiyah Cabang Garut, 1919-1940. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.14710/jscl.v6i2.33610>
- Santoso, M., & Khisbiyah, Y. (2021). Islam-based peace education: Values, program, reflection and implication. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.185-207>
- Sari & Asri. (2023). Muhammadiyah dan Sekolah: Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Paraman Ampalu Kabupaten Pasaman Barat 1942-2018. *Jurnal Kronologi*, 4(2), 489–501. <https://doi.org/10.24036/jk.v4i2.291>
- Setiawan, S. (2025). Strategi Ahmad Dahlan dalam modernisasi pendidikan Islam Muhammadiyah. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i2.2715>
- Suradji, M., Romelah, R., & Hakim, M. N. (2023). Eksistensi Muhammadiyah Di Tengah Tantangan Zaman. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 30–37. <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3955>
- Suyatno, S., Wantini, W., Sukiman, S., & Rachmawati, Y. (2022). Progressive Islamic education: Bridging the gap of Islam, Indonesianness, and modernity. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.4782>
- Takdir, M., & Munir, A. (2025). Genealogy and orientation of the Islamic modernist movement in Indonesia: Case study of the Muhammadiyah renewal movement. *Journal of Al-Tamaddun*. <https://doi.org/10.22452/jat.vol20no1.6>
- Umar, M., Ismail, F., Rahmi, S., & Arifin, Z. (2024). Transforming of moderate character education in Islamic educational institutions. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i1.4168>
- UMY, D. (2026, April 6). Fenomena Login Muhammadiyah di Era Digital. *UMY*. <https://www.umy.ac.id/fenomena-login-muhammadiyah-di-era-digital/>